

Effectiveness of Sembako Program in Entalsewu Village Buduran District Sidoarjo Regency

[Efektivitas Program Sembako di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo]

Sofi Intan Febrianti¹⁾, Isnaini Rodiyah^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. This research aims to analyze and describe the effectiveness of the Sembako Program in Entalsewu Village, Buduran Subdistrict, Sidoarjo Regency. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Data analysis employs the Miles and Huberman model, which consists of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The research findings are reviewed based on five indicators. First, the program success indicator shows that the program was implemented on time with the support of active and responsive officers. Second, the target achievement indicator reveals that the program's recipients were selected based on outdated data and community proposals, with issues resolved through coordination with the Social Services Department. Third, the satisfaction indicator indicates that the community was fairly satisfied with the information and assistance received, although there were variations in the timing of aid disbursement. Fourth, the input and output indicator shows that officers have conducted technical training on the SIKS-NG application, but the outcomes of these efforts still need improvement. Fifth, the overall goal achievement indicator demonstrates that the village government has been responsive in addressing challenges through cross-sector coordination.

Keywords - Effectiveness; Social Assistance; Sembako Program

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Program Sembako di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditinjau dari lima indikator. Pertama, indikator keberhasilan program menunjukkan bahwa program dilaksanakan tepat waktu dengan dukungan petugas yang aktif dan responsif. Kedua, indikator keberhasilan sasaran menunjukkan bahwa sasaran program berasal dari data lama dan usulan masyarakat, dengan kendala yang diatasi melalui koordinasi dengan Dinas Sosial. Ketiga, indikator kepuasan terhadap program menunjukkan bahwa masyarakat merasa cukup puas terhadap informasi dan bantuan yang diterima, meskipun terdapat perbedaan waktu pencairan bantuan. Keempat, indikator tingkat input dan output menunjukkan bahwa petugas telah melakukan bimbingan teknis aplikasi SIKS-NG, namun hasil yang dicapai dari upaya tersebut masih perlu ditingkatkan. Kelima, indikator pencapaian tujuan secara menyeluruh menunjukkan bahwa pemerintah desa bersikap responsif dalam menyelesaikan kendala melalui koordinasi lintas pihak.

Kata Kunci – Efektivitas; Bantuan Sosial; Program Sembako

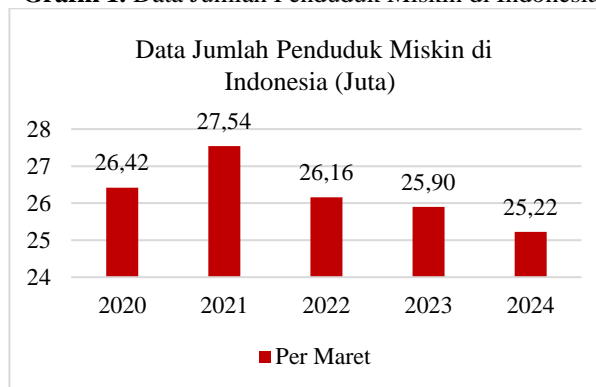
I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan sosial. Salah satu permasalahan utama yang melatarbelakangi kemiskinan adalah kesulitan akses pekerjaan, di mana banyak individu, terutama yang berpendidikan rendah, mengalami tantangan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, kemiskinan adalah masalah yang rumit dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berhubungan, termasuk tingkat pendapatan, akses terhadap pendidikan, ketersediaan barang dan jasa, lokasi geografis, perbedaan gender, serta kondisi lingkungan. Faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada munculnya kemiskinan di masyarakat [1].

Emil Salim menyatakan bahwa penduduk miskin memiliki lima karakteristik utama yaitu tidak memiliki faktor produksi sendiri, tidak mampu memperoleh aset produksi dengan usahanya sendiri, tingkat pendidikan yang umumnya rendah, sebagian besar tidak memiliki akses fasilitas, dan banyak yang berusia relatif muda dan kurang memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai [2].

Berikut merupakan data jumlah penduduk miskin di Indonesia:

Grafik 1. Data Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang masih menjadi masalah hingga sekarang. Pada tahun 2020, penyebab utama kemiskinan adalah pandemi Covid-19. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan perubahan perilaku sosial-ekonomi memberikan dampak besar, yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin secara tajam [3]. Pada tahun 2021, angka kemiskinan meningkat karena dampak pandemi yang masih berlangsung. Kondisi ini memperburuk perekonomian, terutama bagi masyarakat rentan yang kehilangan mata pencaharian [4]. Pada tahun 2022, angka kemiskinan mulai menurun. Penurunan ini didukung oleh sejumlah faktor, yaitu penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), peningkatan penyaluran bantuan sosial berupa sembako, serta membaiknya daya beli masyarakat yang tercermin dari penguatan inflasi inti [5]. Pada tahun 2023, angka kemiskinan terus menurun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat pengangguran, terkendalinya laju inflasi, serta keberlanjutan program bantuan sosial yang efektif dalam meringankan beban masyarakat miskin [6]. Pada tahun 2024, angka kemiskinan semakin menurun. Faktor utama yang mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan adalah penguatan perekonomian domestik yang disertai dengan optimalisasi program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Beras, BLT Mitigasi Risiko Pangan, BPNT, PKH, dan PIP [7]. Meskipun terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tren kemiskinan yang tidak stabil tersebut masih mencerminkan angka kemiskinan yang besar di Indonesia, sehingga tetap menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya mendukung pembangunan negara [8].

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin tertera bahwa fakir miskin berhak untuk memperoleh kecukupan dalam kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, serta perlindungan sosial yang membantu dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budaya mereka. Selain itu, mereka berhak atas pelayanan sosial melalui jaminan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga. Fakir miskin juga memiliki hak untuk memperoleh derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, serta kondisi hidup yang berkesinambungan, dan berhak atas kesempatan kerja dan usaha. Dengan memenuhi hak-hak tersebut, diharapkan tercipta kondisi kehidupan yang layak, lingkungan yang sehat, serta keberlanjutan hidup bagi fakir miskin, sehingga pada akhirnya dapat tercapai kesejahteraan.

Untuk mencapai kesejahteraan sosial, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau layanan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang miskin, kurang mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pemberian bantuan sosial mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, serta sosial, termasuk aspek psikososial dan ekonomi. Program ini juga berfokus pada pemberdayaan potensi yang dimiliki, sehingga individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat terus menjalani hidup secara layak. Penerima bantuan sosial adalah masyarakat yang memenuhi kriteria dalam masalah sosial, seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial atau perilaku menyimpang, serta korban bencana, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya. Dalam penanganan fakir miskin, terdapat tiga jenis bantuan sosial yaitu bantuan sosial untuk kebutuhan pangan, rehabilitasi sosial bagi rumah yang tidak layak huni serta pengembangan sarana dan prasarana lingkungan, dan bantuan sosial untuk usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama.

Pada jenis bantuan sosial untuk kebutuhan pangan, terdapat program yang disebut dengan Program Sembako. Program Sembako merupakan hasil transformasi dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako tertera bahwa tujuan dari program sembako adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dengan membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan. Program ini juga dirancang untuk menyediakan bahan pangan bergizi bagi KPM, serta memastikan distribusi pangan yang tepat sasaran, tepat waktu, dengan jumlah, kualitas, harga, dan administrasi yang sesuai. Selain itu, program ini memberikan KPM lebih banyak pilihan dan kendali dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Selain memiliki tujuan, Program Sembako juga menawarkan berbagai manfaat. Manfaat tersebut mencakup mendukung ketahanan pangan di tingkat KPM, berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial, serta membantu penanggulangan dan penanganan kemiskinan ekstrem. Selain itu, program ini turut mendorong perekonomian daerah dengan menggerakkan usaha mikro dan kecil dalam bidang perdagangan bahan pangan, serta berperan dalam mencegah terjadinya kekurangan pemenuhan gizi.

Ombudsman RI menyoroti adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan pangan dalam Program Pendataan Penerima Kesejahteraan Ekonomi (P3KE) yang mengakibatkan terjadinya perubahan penerima bantuan di lapangan. Ketidaksesuaian data ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada distribusi bantuan yang kurang tepat sasaran, sehingga mempengaruhi efektivitas program tersebut dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, memerlukan peninjauan lebih lanjut mengenai program tersebut untuk memastikan efektivitasnya. Menurut H. Emerson efektivitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya [9]. Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada seberapa baik suatu program atau kegiatan mampu memenuhi target dan sasaran yang telah direncanakan.

Pelaksanaan Program Sembako di Desa Entalsewu telah dilakukan, di mana bantuan diberikan kepada KPM Program Sembako yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Mekanisme penyaluran melalui bank penyalur mencakup proses registrasi dan pembukaan rekening bagi KPM, edukasi serta sosialisasi terkait program, penyaluran bantuan, hingga penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam Program Sembako. Penyaluran kepada KPM dilakukan secara bertahap, sehingga tidak semua penerima langsung mengantri pada saat yang bersamaan. KPM yang mendapat giliran menerima Program Sembako akan mendapatkan informasi dari aparat desa ketika bantuan yang seharusnya diterima telah cair. Selanjutnya, saldo yang terdapat dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ditukarkan dengan bahan pangan melalui bank penyalur, yaitu Bank HIMBARA/PT. Pos. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Entalsewu, masih terdapat selisih antara jumlah penerima yang seharusnya dengan bantuan yang terealisasi. Berikut adalah data penerima Program Sembako yang seharusnya dan yang terealisasi:

Tabel 1. Rekapitulasi KPM Program Sembako di Desa Entalsewu

No	Tahun	Jumlah KPM	Jumlah Yang Terealisasi
1	2021	168	161
2	2022	187	187
3	2023	204	204
4	2024	261	237

Sumber: Diolah dari Laporan Akhir Distribusi dan Pemanfaatan Bantuan Sosial di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, Website cekbansos.kemensos.go.id, Aplikasi SIKS-NG Pemerintah Desa Entalsewu, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1, tertera bahwa jumlah KPM program sembako di Desa Entalsewu menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima dari tahun ke tahun. Data penerima bantuan berdasarkan pada masyarakat miskin dengan kriteria yaitu lansia yang benar-benar miskin dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, janda, serta keluarga yang secara sosial dan ekonomi benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, seperti sering meminjam uang atau berhutang di warung untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi realisasi bantuan. Pada tahun 2021, jumlah penerima yang tidak terealisasi sebanyak 7 penerima, 3 diantaranya rekening penerima tidak ditemukan di bank penyalur dan 4 diantaranya beda nama rekening di bank penyalur. Hal ini disebabkan oleh adanya gagal omspan, yaitu kegagalan dalam proses pencairan dana, yang terjadi karena rekening penerima tidak ditemukan di bank penyalur dan adanya perbedaan nama rekening dengan data yang tercatat di bank penyalur. Pemerintah desa telah mengupayakan penyelesaian kendala yang dihadapi penerima bantuan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menangani permasalahan di lapangan. Namun tidak semua kendala dapat terselesaikan, yang disebabkan oleh kurangnya kelengkapan atau ketepatan informasi dari pihak penerima dalam menyampaikan pembaruan data kependudukan seperti perpindahan Kartu Keluarga kepada pemerintah desa.

Pada tahun 2022 dan 2023, proses distribusi berjalan lebih baik, di mana seluruh penerima yang terdaftar berhasil menerima bantuan tanpa kendala. Pada tahun 2024, jumlah penerima yang tidak terealisasi sebanyak 24 penerima. Kendala yang terjadi adalah gagalnya proses transfer dana ke rekening penerima, yang mengakibatkan tidak semua penerima mendapatkan bantuan sesuai yang diharapkan. Dari data ini, terlihat bahwa kendala administratif dalam proses pencairan dana masih kerap terjadi, terutama terkait dengan validasi rekening penerima. Kendala gagal proses

transfer bantuan terjadi karena data yang masuk ke dalam sistem merupakan hasil integrasi otomatis dari data BPS dan Disdukcapil, tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah desa. Pada data tersebut, masih terdapat rekening penerima yang belum tervalidasi, sehingga mempengaruhi kelancaran proses penyaluran bantuan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan terdapat beberapa permasalahan dalam program sembako di Desa Entalsewu. Diantaranya, pertama yaitu terdapat kendala dalam pencairan dana akibat identitas penerima yang tidak ditemukan di bank penyalur, sehingga hal tersebut menyebabkan permasalahan pada keberhasilan program yang dimana tidak sesuai dengan proses penyaluran Program Sembako melalui pos penyalur yang terdapat dalam ketentuan. Kedua, terdapat masalah pada ketidaksesuaian antara nama penerima dan rekening penerima yang terdaftar di bank penyalur, sehingga hal ini menyebabkan permasalahan dalam keberhasilan sasaran. Hal tersebut menyimpang pada ketentuan dalam pemantauan pelaksanaan program yaitu tepat administrasi. Ketiga, terdapat permasalahan pada jumlah penerima yang tidak terealisasi dalam menerima bantuan yang seharusnya mereka terima, hal ini menyebabkan permasalahan yaitu belum mencapai tujuan secara menyeluruh. Selisih penerima yang seharusnya dan jumlah penerima yang terealisasi terdapat pada Tabel 1.

Menurut Campbell J.P, terdapat lima aspek untuk mengukur efektivitas suatu program. Lima aspek tersebut adalah yang pertama keberhasilan program, efektivitas sebuah program bisa tercapai dengan kapasitas operasional dalam merealisasikan kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dan keberhasilan program ini dapat dilihat dari cara dan proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kedua adalah keberhasilan sasaran, efektivitas dapat dinilai berdasarkan pencapaian tujuan dengan memberikan perhatian khusus pada aspek output. Dengan demikian, efektivitas dapat diukur melalui sejauh mana tingkat output yang dihasilkan oleh kebijakan dan alur kerja organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Ketiga adalah kepuasan terhadap program, kepuasan adalah salah satu kriteria untuk menilai efektivitas yang berhubungan dengan hasil optimal program terhadap kebutuhan pengguna. Kepuasan ini dirasakan manfaatnya oleh pengguna terkait dengan kualitas produk atau layanan yang diberikan. Keempat adalah tingkat input dan output, tingkat input dan output dapat diukur melalui perbandingan antara masukan input dan keluaran output. Jika output lebih besar dibandingkan dengan input, maka dapat dikatakan bahwa proses tersebut efisien. Sebaliknya, jika input lebih besar daripada output, maka proses tersebut dianggap tidak efisien. Dan yang kelima adalah pencapaian tujuan menyeluruh, yaitu sejauh mana organisasi menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, penilaian yang dilakukan bersifat umum dan hanya menggunakan satu kriteria, yang menghasilkan evaluasi umum tentang efektivitas [10].

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan adalah pertama, yaitu pada penelitian yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai di Desa Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai tersebut di Desa Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai di Desa Pucang dari segi komunikasi berjalan lancar dengan kegiatan sosialisasi yang efektif, dan KPM Keluarga Penerima Manfaat sudah memahami program BPNT. Dari segi sumber daya, petugas memiliki keahlian dalam menjalankan program. Dari segi disposisi, petugas mendukung dan berkomitmen melaksanakan program tersebut. Namun, terdapat keluhan dari KPM terkait penerima bantuan BPNT yang masih belum tepat sasaran karena masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. Selain itu, terdapat masalah saldo nol di rekening KPM serta gangguan/kesalahan pada mesin EDC. Dari segi struktur birokrasi, program ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku [11]. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas topik terkait bantuan sosial pangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada fokus penelitian, dimana penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi program dan penelitian ini berfokus pada efektivitas program.

Kedua, yaitu penelitian yang berjudul Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT Program Sembako Di Kecamatan Awan Kabupaten Balangan Studi Kasus Desa Ambakiang Dan Desa Piyait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program masih belum memadai, yang dapat dilihat dari beberapa variabel. Pertama, tujuan program dan indikator perencanaan dinilai cukup efektif. Kedua, variabel keberhasilan sasaran menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran belum efektif, sementara indikator SOP sudah baik. Ketiga, variabel kepuasan terhadap program terdiri dari indikator pelaksanaan kegiatan oleh petugas dan kepuasan terhadap pelaksanaan yang sudah baik. Keempat, variabel pencapaian tujuan menyeluruh menunjukkan bahwa indikator strategi kegiatan sudah baik, dan penilaian organisasi juga sudah baik. Monitoring telah dilaksanakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas program antara lain adalah penggunaan data lama untuk nama-nama penerima BPNT yang belum diperbarui, serta kurangnya edukasi mengenai pengelolaan dan

pemanfaatan bantuan yang tepat di Desa Ambakiang dan Desa Piyait. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan pendataan ulang penerima BPNT dan pengarahan atau edukasi tentang tujuan sebenarnya dari BPNT kepada masyarakat, yang dilakukan secara berkala, kadang setiap tiga bulan sekali [10]. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama berfokus pada efektivitas program bantuan sosial pangan dan indikator efektivitas dari Campbell J.P serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada cakupan wilayah penelitian, penelitian sebelumnya mencakup dua desa, sedangkan penelitian ini mencakup satu desa.

Ketiga, penelitian yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami seberapa efektif pelaksanaan dan faktor-faktor yang menghambat Program Sembako di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif disertai persentase. Penulis melakukan pengumpulan data dengan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar belum berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat lantaran masih terdapat ketidakakuratan dalam penentuan penerima program, kurangnya wawasan KPM terhadap bantuan sosial yang diterima, serta kurangnya pemantauan terhadap KPM, yang menyebabkan tujuan program belum tercapai secara optimal [12]. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas program sembako. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah pada pemilihan lokasi penelitian. Berdasarkan gambaran permasalahan yang dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Program Sembako di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang difokuskan pada pemahaman lebih dalam terhadap suatu fenomena dalam kondisi alami [13]. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena ada permasalahan terkait efektivitas program sembako. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah bentuk percakapan langsung yang bertujuan untuk memperkuat data sekunder dalam penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena di lapangan, baik yang secara langsung terkait maupun tidak langsung terkait dengan penelitian. Sementara itu, teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian sosial yang digunakan untuk menggali informasi historis [14]. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan sekretaris desa dan seksi kesejahteraan rakyat yang memiliki pemahaman tentang program ini. Fokus penelitian ini terdapat pada Efektivitas Program Sembako di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dalam mengukur efektivitas program pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator efektivitas program menurut Campbell J.P yang terdiri dari 1) Keberhasilan program, 2) Keberhasilan sasaran, 3) Kepuasan terhadap program, 4) Tingkat input dan output dan 5) Pencapaian tujuan menyeluruh.

Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu menentukan sampel didasarkan pada penilaian terhadap karakteristik sampel yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Informan pada penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Entalsewu. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis data dari Miles dan Huberman, yang melibatkan proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data non-numerik untuk menghasilkan informasi atau pola yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian. Proses analisis data terdiri dari empat langkah, yaitu: 1) Pengumpulan data, yang merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau mengumpulkan berbagai fenomena, informasi, atau kondisi yang relevan dengan lokasi dan lingkup penelitian. 2) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data yang diperoleh dari lapangan. 3) Penyajian data, yang mencakup pengorganisasian data yang telah tersusun untuk memudahkan penarikan kesimpulan. 4) Penarikan kesimpulan, yaitu tahap dimana peneliti mengambil kesimpulan data sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam pendahuluan [15].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, peneliti berhasil memperoleh hasil pembahasan dalam penelitian ini yang berjudul Efektivitas Program Sembako di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

A. Keberhasilan Program

Keberhasilan program merupakan hasil dari kemampuan penyelenggara dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada peserta yang menjadi sasaran. Informasi yang jelas dan mudah dipahami membantu memastikan program berjalan dengan baik. Memberikan informasi sejak awal sangat penting agar hasil yang diperoleh lebih maksimal dan pekerjaan dapat berjalan lancar. Dengan informasi yang tepat, masyarakat yang menerimanya dapat menggunakannya dengan baik dan menambah wawasan [16]. Keberhasilan program dapat dilihat dari segi pelaksanaan program. Pelaksanaan program sembako di Desa Entalsewu penyalurannya dilakukan secara bertahap. Bantuan yang telah cair tidak dapat dibagikan secara serentak kepada seluruh penerima, melainkan disalurkan secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam hal penyampaian informasi, Pemerintah Desa Entalsewu memiliki peran aktif dalam memberitahu masyarakat terkait pencairan bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketika ada pemberitahuan bahwa bantuan telah cair dan nama-nama penerima muncul pada aplikasi, pihak desa segera menghubungi warga yang bersangkutan. Upaya ini dilakukan agar penerima bantuan dapat segera memastikan keakuratan informasi tersebut dan mengambil bantuan tanpa penundaan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mempercepat proses penyaluran bantuan serta memastikan bahwa bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“Untuk pelaksanaannya itu bantuan yang cair tidak bisa langsung bareng semuanya tapi bertahap. Jadi saat di aplikasi ada nama yang muncul pada pemberitahuan bantuan cair, yang bersangkutan saya beritahu untuk bisa mengecek dan segera mengambil.” (Wawancara 25 Februari 2025)

Dari segi tujuan program, Program Sembako bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. pelaksanaan di Desa Entalsewu mempermudah penerima bantuan dalam mengakses dana secara mandiri melalui KKS, khususnya untuk pembelanjaan sembako. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti antrean panjang di warung tertentu yang ditunjuk. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Desa Entalsewu memberikan kebebasan bagi penerima bantuan untuk mengambil dana melalui ATM yang tertera dalam keterangan pada KKS, sehingga penerima dapat membelanjakan sembako dimana saja. Selain itu, pemerintah desa juga terus memantau dan mengatasi permasalahan teknis, seperti saldo yang tidak muncul bagi penerima baru serta kartu KKS yang terblokir akibat kesalahan memasukkan PIN, guna memastikan bantuan dapat diterima secara optimal oleh masyarakat yang berhak.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“Kalau bantuan pas cair bisa diambil di ATM pakai KKS itu tadi, dulu waktu awal-awal ada program ini bisa diambil ke ATM dan harus dibelikan sembako diwarungnya pak imron atau bisa langsung gesek kartu ke mesinnya di warungnya pak imron. Tapi kalau sekarang karena banyak yang mengeluh antri panjang, jadi dibebaskan untuk membeli sembako di toko mana saja. Untuk saldo yang kadang nol tapi di sistem namanya muncul jika bantuan sudah cair, itu biasanya nama baru yang memang rawan ada kendala. Tapi kadang ada yang biasanya dapat bantuan ada kendala karena waktu ambil di ATM salah pin terus jadi KKS terblokir.” (Wawancara 25 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa indikator keberhasilan program sembako di Desa Entalsewu terlihat dari segi pelaksanaannya yang dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan serta peran aktif pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait pencairan bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu, pemerintah desa juga terus memantau dan menyelesaikan kendala teknis, seperti saldo yang tidak muncul atau kartu KKS yang terblokir, agar bantuan dapat diterima dengan lancar oleh masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mempercepat penyaluran bantuan dan memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini sejajar dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mety Ernawati, Sugianor, dan Arpandi (2024) yang berjudul Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait), ditemukan bahwa indikator keberhasilan program dari segi pelaksanaan di Desa Ambakiang dan Desa Piyait cukup efektif. Setiap bagian atau instansi yang terlibat dalam BPNT Program Sembako telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik [10]. Dari segi tujuan program, program ini bertujuan untuk meringankan beban penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dalam pelaksanaannya, program ini mempermudah penerima dalam mengakses dana melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pemerintah Desa Entalsewu sudah memberikan solusi terkait antrian panjang di warung penukaran sembako yaitu dengan memberikan kebebasan bagi penerima untuk berbelanja di tempat mana saja. Hal ini sejajar dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mety Ernawati, Sugianor, dan Arpandi (2024) yang berjudul Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan

Desa Piyait), ditemukan bahwa tujuan program cukup efektif yaitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa bahan sembako [10].

Gambar 1. Kartu Keluarga Sejahtera



Sumber: Oleh Peneliti, 2025

B. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran merupakan sejauh mana pencapaian tujuan program dapat tercapai dengan memastikan kesesuaian antara target yang ditetapkan dan hasil yang diperoleh berdasarkan sasaran yang telah dirancang sebelumnya [17].

Dari segi ketepatan sasaran, Pemerintah Desa Entalsewu berupaya memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui mekanisme pembaruan data penerima. Proses pembaruan ini dilakukan dengan mengacu pada data lama yang telah tersedia serta tambahan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Nama penerima baru dapat muncul secara tiba-tiba tanpa melalui proses pengajuan dari pihak desa, karena data tersebut diperbarui atau ditetapkan langsung oleh BPS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“Kalau data, itu dari data yang lama dan data juga ada tambahan dari BPS, yang tiba-tiba nama itu muncul sebagai penerima tanpa kita ajukan.” (Wawancara 25 Februari 2025)

Selain itu, mekanisme pembaruan juga mencakup verifikasi perubahan status penerima bantuan. Jika seorang penerima meninggal dunia, maka statusnya akan dihentikan, dan pemerintah desa dapat mengajukan penggantinya, terutama jika dalam rumah tangga tersebut masih ada anggota keluarga yang membutuhkan. Ahli waris dari penerima bantuan yang telah meninggal juga dapat diusulkan sebagai penerima baru, namun harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“Kadang ada penerima bantuan yang putus di tahun itu karena perubahan status itu tidak bisa berubah, misal ada yang meninggal baru bisa verifikasi kemudian bisa nambah penerima yang diajukan. Barangkali di dalam rumah tangga itu masih ada yang membutuhkan, ahli warisnya bisa.” (Wawancara 25 Februari 2025)

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ageng Heru selaku Sekretaris Desa dan Operator SIKS-NG di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“Data juga ada tambahan dari BPS, yang tiba-tiba nama itu muncul sebagai penerima tanpa kita ajukan dan kadang ada penerima bantuan yang putus di tahun itu karena perubahan status” (Wawancara 14 Februari 2025)

Dari segi Standar Operasional Prosedur (SOP), Pemerintah Desa Entalsewu melalui beberapa tahapan dalam menetapkan penerima bantuan sembako agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat. Proses ini diawali dengan pendaftaran melalui aplikasi SIKS-NG, di mana masyarakat diwajibkan membawa KTP dan KK serta memberikan alasan pengajuan bantuan. Sebelum data dimasukkan ke dalam sistem, pemerintah desa melakukan survei langsung ke rumah calon penerima untuk memastikan kelayakan mereka sebagai penerima bantuan. Hasil survei tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah desa (Musdes) untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Jika pengajuan disetujui dalam Musdes, data calon penerima akan dimasukkan ke dalam sistem dan menunggu proses verifikasi lebih

lanjut. Apabila pengajuan disetujui oleh pihak yang berwenang, calon penerima akan memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan sebagai alat transaksi dalam pencairan bantuan. Untuk memastikan bantuan dapat diakses dengan baik, pemerintah desa juga memberikan arahan kepada penerima baru yang masih mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“Kalau didaftarkan dari sini ya itu tadi pakai aplikasi SIKS-NG, nanti datanya dimasukkan disitu. Masyarakatnya nanti saya minta bawa KTP sama KK kesini untuk didaftarkan di sistem sama saya tanya-tanya juga alasan minta diusulkan. Tapi sebelum didaftarkan di sistem, kami survei dulu kerumah yang bersangkutan. Dari situ nanti kami obrolkan di musdes, baru kalau sudah ada kesepakatan baru diusulkan di sistem dan nunggu verifikasi disetujui atau tidak. Kalau disetujui berarti nanti ada KKS nya turun terus kami kasihkan. Kalau yang masih baru biasanya memang agak kesusahan mengambil bantuannya, kan masih baru jadi saya beritahu bagaimana cara mencairkan bantuannya.” (Wawancara 25 Februari 2025)

Dalam hal kendala administrasi, Pemerintah Desa Entalsewu berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menangani permasalahan, seperti perbedaan data penerima atau gangguan sistem. Kendala yang sering terjadi adalah ketika nama penerima muncul dalam sistem, tetapi saldo bantuan tidak dapat diakses. Hal ini disebabkan oleh kesalahan administrasi atau eror dalam sistem. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa melaporkan nama-nama penerima yang mengalami kendala kepada Dinas Sosial agar segera dicarikan solusinya. Jika permasalahan sudah terselesaikan, penerima tersebut dapat kembali menerima bantuan pada periode berikutnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“Kalau yang eror itu kayak yang nama si penerima karena ada eror administrasi atau ada keerroran sistem, nah itu nanti nama yang bermasalah nanti ditanyakan ke dinsos dan nanti dicarikan solusinya. Biasanya kalau sudah clear, dapat lagi bantuannya di periode berikutnya.” (Wawancara 25 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa indikator keberhasilan sasaran sembako di Desa Entalsewu menunjukkan dalam pelaksanaannya data KPM berasal dari data lama. Ada nama baru hanya ketika ada masyarakat yang ingin diusulkan dan penambahan otomatis dari BPS. Hasil temuan ini, sejajar dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdiana Ilosa, Zuhaida, dan Mike Nurjana yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum efektif karena data KPM masih menggunakan data lama [12].

Pengusulan data masyarakat tidak dilakukan secara langsung ke dalam sistem, melainkan melalui proses survei lapangan dan musyawarah desa sebelum diajukan ke dalam sistem SIKS-NG. Kendala administrasi, seperti ketidaksesuaian data atau gangguan sistem, diselesaikan dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mety Ernawati, Sugianor, dan Arpandi (2024) yang berjudul Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako di Kecamatan Awan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait), yang menyatakan bahwa monitoring dilakukan melalui evaluasi untuk memastikan program ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan [10].

Gambar 2. Survei Penerima Bantuan



Sumber: Pemerintah Desa Entalsewu, 2025

C. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program merupakan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pelaksanaan program. Semakin tinggi kepuasan tersebut, semakin positif respons yang diberikan oleh masyarakat. Kepuasan ini dapat diukur melalui tanggapan dan penerimaan masyarakat terhadap manfaat yang dirasakan dari program tersebut [18].

Dari segi pelaksana kegiatan program, Pemerintah Desa Entalsewu berperan dalam memastikan bahwa pencairan bantuan berjalan dengan lancar serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme pencairan yang diterapkan. Salah satu keluhan yang sering muncul dari masyarakat adalah perbedaan waktu pencairan bantuan antar penerima. Banyak warga yang mempertanyakan mengapa bantuan tidak cair secara bersamaan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penerima. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

"Biasanya kalau keluhan itu, banyak yang mengeluh dan menanyakan kenapa bantuannya cairnya nggak bareng. Nah, saat itu juga saya jelaskan sama beri pengertian kalau memang antar penerima satu dengan yang lain itu memang bertahap dan nggak bisa langsung turun bres." (Wawancara 25 Februari 2025)

Untuk mengatasi keluhan tersebut, pemerintah desa memberikan penjelasan bahwa pencairan bantuan dilakukan secara bertahap, sehingga tidak semua penerima dapat menerima dana pada waktu yang sama. Setelah dijelaskan, masyarakat akhirnya mengerti. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

"Alhamdulillahnya setelah saya jelaskan, mereka ngerti dan sudah nggak ada iri-irian lagi sama tetangganya yang dapat juga." (Wawancara 25 Februari 2025)

Dari segi kepuasan terhadap pelaksanaan, masyarakat Desa Entalsewu merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan sembako. Bantuan sebesar Rp200.000 per bulan ini digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan bahan makanan lainnya, sehingga meringankan beban mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Banyak penerima yang sering menanyakan kapan bantuan cair, karena mereka sangat membutuhkan dana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan ini memang penting bagi kehidupan mereka.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

"Orang-orang merasa terbantu karena kalau belum cair-cair biasanya mereka sering bertanya kapan cair kapan cair kapan cair terus yang memang merasa terbantu dengan uang dua ratus ribu per bulan itu. Dari uang 200.000 itu dapat digunakan untuk membeli bahan makanan seperti beras, minyak, dan lain lain, kalau rokok itu nggak boleh." (Wawancara 25 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pada indikator kepuasan terhadap program, Pemerintah Desa Entalsewu berperan dalam memastikan kelancaran pencairan bantuan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme pencairan. Kendala yang sering muncul adalah perbedaan waktu pencairan antar penerima. Hasil yang dijumpai penulis sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mety Ernawati, Sugianor, dan Arpandi (2024) yang berjudul "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako di Kecamatan Awan, Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait)" dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cukup efektif, petugas menjalankan tugasnya dengan baik dengan menginformasikan program kepada KPM [10].

Gambar 3. Sosialisasi Program



Sumber: Pemerintah Desa Entalsewu, 2025

D. Tingkat Input dan Output

Tingkat input dan output dinilai berdasarkan perbandingan antara pemasukan (input) dan hasil yang diperoleh (output). Suatu proses dianggap efektif jika output yang dihasilkan melebihi input. Sebaliknya, apabila input lebih besar daripada output, maka proses tersebut dapat dikatakan belum efektif [19].

Dari segi sumber daya manusia, pelaksanaan program di Desa Entalsewu melibatkan dua orang petugas, yaitu Sekretaris Desa dan Seksi Kesejahteraan Rakyat. Kedua petugas tersebut memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. Pendidikan Terakhir Petugas Program Sembako

No	Petugas Program Sembako	Pendidikan Terakhir
1	Sekretaris Desa	SMA
2	Seksi Kesejahteraan Rakyat	SMA

Sumber; Pemerintah Desa Entalsewu, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, kedua petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program sembako di Desa Entalsewu memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA. Tingkat pendidikan ini memenuhi syarat untuk administrasi dasar, namun dalam pelaksanaan program, diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan atau bimbingan teknis guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola bantuan kepada masyarakat. Selain itu, program sembako ini diakses melalui aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan melalui website, sehingga diperlukan keterampilan dalam mengoperasikan sistem tersebut agar pelaksanaan program dapat berjalan. Pemerintah Desa Entalsewu sudah melaksanakan BIMTEK terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG sebagai sistem penunjang mengelola bantuan sembako melalui sistem sebanyak tiga kali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ageng Heru selaku Sekretaris Desa dan Operator SIKS-NG di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“Untuk petugas ini ada 2, saya sama kesra.” (Wawancara 14 Februari 2025)

Bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa:

“Dulu waktu awal-awal pakai aplikasi ini, ada BIMTEK nya sudah tiga kali seingat saya.” (Wawancara 25 Februari 2025)

Dari segi jumlah layanan, Pemerintah Desa Entalsewu memberikan bantuan kepada penerima yang mengalami kendala dalam proses pencairan bantuan. Berikut adalah jumlah penerima yang telah diproses dan yang berhasil menerima bantuan kembali:

Tabel 3. Jumlah Kendala Yang di Proses

No	Tahun	Jumlah KPM Terkendala	Jumlah KPM Berhasil Diproses
1	2021	7	0
2	2022	0	0
3	2023	0	0
4	2024	24	13

Sumber; Diolah dari Pemerintah Desa Entalsewu, 2025

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2021 terdapat 7 penerima yang mengalami kendala dalam pencairan bantuan. Namun, pada tahun tersebut belum ada yang berhasil diproses karena pemerintah desa masih dalam tahap adaptasi dengan sistem baru yang menggunakan aplikasi SIKS-NG. Pada tahun 2022 dan 2023, tidak terdapat penerima yang mengalami kendala dalam pencairan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencairan berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang memerlukan perbaikan. Pada tahun 2024, terdapat 24 penerima yang mengalami kendala dalam pencairan bantuan. Dari jumlah tersebut, 13 penerima telah berhasil diproses dan kembali menerima bantuan pada periode berikutnya. Sementara itu, 11 penerima lainnya masih dalam proses penyelesaian, dengan penyebab kendala yang masih belum dapat dipastikan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“Waktu awal awal kan masih menyesuaikan diri buat pakai aplikasi ini, jadi ya ada kendala yang tidak terselesaikan. Kalau yang tahun kemarin itu ada beberapa yang gagal dan masih diproses, ada yang sudah berhasil.” (Wawancara 25 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pada indikator input dan output dalam pelaksanaan program bantuan sembako di Desa Entalsewu, petugas telah melakukan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG dalam pengelolaan program sembako. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Rochmah Yulia Safitri dan Isnaini Rodiyah dalam penelitian berjudul Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa petugas telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, yaitu pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial mengenai tata cara penggunaan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) [11]. Beberapa kendala dalam pencairan bantuan telah berhasil diatasi. Dari 31 penerima yang mengalami kendala dalam proses pencairan, sebanyak 13 penerima telah berhasil diproses dan menerima bantuan kembali. Dalam hal ini, hasil yang ditemukan belum efektif, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P., efektivitas suatu program dapat diukur berdasarkan perbandingan antara input dan output yang dihasilkan. Sebuah program dianggap efektif apabila hasil atau manfaat yang diperoleh (output) lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaannya (input). Dengan kata lain, semakin tinggi hasil yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien, maka semakin efektif program tersebut [10].

E. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan sejauh mana organisasi menjalankan tugasnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penilaian dilakukan secara umum dengan mempertimbangkan sebanyak mungkin kriteria tunggal guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas organisasi [20].

Dari segi strategi pencapaian tujuan, Pemerintah Desa Entalsewu memastikan bantuan sembako tersalurkan secara tepat sasaran dengan melakukan survei terlebih dahulu sebelum mengusulkan penerima bantuan melalui aplikasi SIKS-NG. Survei ini dilakukan untuk mendata dan memverifikasi kondisi calon penerima agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah Desa Entalsewu juga memantau seluruh proses penyaluran bantuan, mulai dari pengusulan dalam sistem hingga pencairan bantuan, guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Ketika terjadi kendala dalam proses penyaluran bantuan sembako, Pemerintah Desa Entalsewu segera mengambil langkah untuk mencari solusi. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara Pemerintah Desa Entalsewu dan pihak bank penyalur tidak dapat dilakukan secara langsung, karena mekanisme tersebut sepenuhnya diatur oleh kementerian pusat. Oleh karena itu, jika terjadi kendala seperti rekening yang belum teraktivasi di bank penyalur sehingga saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak muncul meskipun KKS sudah tercetak dan diberikan kepada penerima, Pemerintah Desa Entalsewu menghubungi Dinas Sosial untuk menanyakan penyebab serta solusi atas permasalahan tersebut. Setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, pemerintah desa terus memantau aplikasi SIKS-NG untuk memastikan apakah kendala yang dialami penerima bantuan telah terselesaikan. Jika permasalahan telah teratasi, pemerintah desa segera memberitahukan kepada penerima bahwa bantuan sudah bisa diterima.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“Untuk rencana yang dilakukan itu, permintaan masyarakat yang minta untuk mendapat bantuan di survei terlebih dahulu, baru nanti kalau betul-betul tidak mampu diusulkan di sistem. Kalau untuk kendala yang pencairan, tidak bisa langsung ke bank penyalur karena mekanisme penyaluran dilakukan sama kementerian pusat, jadi bisanya menghubungi dinas sosial untuk kendala yang terjadi, sebabnya apa dan nanti dikasih solusi. Kalau kendalanya sudah clear, saya kabari penerima yang dapat bantuan tersebut untuk segera cek dan mengambil.” (Wawancara 25 Februari 2025)

Dari segi penilaian organisasi, Pemerintah Desa Entalsewu menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program sembako, khususnya pada proses pencairan bantuan. Pergantian Kartu Keluarga (KK) dari penerima bantuan seringkali menghambat pencairan karena nomor KK dan NIK yang terdaftar pada awal pengusulan tidak sesuai dengan data terbaru, sementara penerima tidak melaporkan perubahan tersebut ke desa. Ketika terjadi kendala dalam penyaluran dana ke KKS, Pemerintah Desa Entalsewu tidak dapat langsung berkoordinasi dengan bank penyalur, karena kementerian pusat sepenuhnya mengendalikan mekanisme tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Desa Entalsewu membantu warga yang mengalami kendala pencairan. Pemerintah desa membantu perubahan data identitas penerima yang baru dan menunggu proses verifikasi dari dinas terkait dalam aplikasi SIKS-NG. Selain itu, untuk memastikan seluruh penerima bantuan dapat terealisasi dengan baik, pemerintah desa menekankan kepada masyarakat agar segera melaporkan kendala pencairan kepada ketua RT ketika ada kendala. Ketua RT kemudian

menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah desa agar dapat segera diproses, mengingat tidak semua masyarakat memiliki waktu luang untuk datang langsung ke kantor desa.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ulumuddin selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yaitu:

“Tantangannya itu kalau ada pecah KK si penerima itu kan otomatis identitas yang dulu sama yang baru beda, kadang itu tidak bilang, jadi kita tidak bisa langsung memproses perubahan data di sistem. Jadinya ya itu tadi, tau-tau proses penyalurannya tidak bisa ke transfer ke KKS dan penerima baru melapor. Dari situ baru bisa diproses di aplikasi. Nah biar bisa segera diproses, biasanya kita langsung telfon ke dinas biar konfirmasinya cepat. Untuk penerima yang terkendala bisa bilang ke RT, biar nanti disampaikan ke perangkat desa. Soalnya ga semua orang ada waktu luang dan bisa izin di tempat kerja. Nah kalau bilang ke RT kan nanti bisa di WA kan ke saya.” (Wawancara 25 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa indikator pencapaian tujuan menyeluruh program sembako di Desa Entalsewu terlihat yang dilakukan yaitu pemerintah desa responsif dalam menangani kendala yang dihadapi KPM dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial. Pemerintah desa juga mempermudah KPM dalam menyampaikan kendala dengan melaporkannya kepada ketua RT, yang kemudian diteruskan ke bagian kesejahteraan rakyat (Kesra). Hasil yang dijumpai penulis sejajar dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait)” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program adalah mendatangkan koordinator pada desa untuk berkoordinasi dengan koordinator program dalam menangani masalah yang terjadi [10].

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program Sembako di Desa Entalsewu cukup efektif pada berbagai indikator, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Pertama, pada indikator keberhasilan program, pelaksanaan telah dilakukan sesuai jadwal dengan petugas yang aktif menyampaikan informasi pencairan, memantau, dan menyelesaikan kendala teknis, serta memberikan alternatif solusi. Kedua, pada indikator keberhasilan sasaran, program masih mengandalkan data lama dengan pembaruan melalui usulan masyarakat dan penambahan dari BPS, pengusulan dilakukan melalui survei lapangan dan musyawarah desa, dan kendala administrasi diselesaikan melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dengan monitoring berkala. Ketiga, pada indikator kepuasan terhadap program, Pemerintah Desa Entalsewu berhasil memastikan kelancaran pencairan bantuan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, meskipun terdapat perbedaan waktu pencairan antar penerima. Keempat, pada indikator tingkat input dan output, petugas telah melaksanakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIKS-NG dan berhasil mengatasi sebagian kendala pencairan, namun perbandingan antara input dan output masih perlu ditingkatkan. Kelima, pada indikator pencapaian tujuan menyeluruh, Pemerintah Desa Entalsewu responsif dalam menangani kendala penerima manfaat dengan koordinasi bersama Dinas Sosial dan pelibatan ketua RT untuk menyampaikan kendala ke bagian kesejahteraan rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada para informan yang telah berbagi pengalaman, dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas bimbingannya, serta keluarga yang selalu mendukung. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan dan menerima segala kritik serta saran demi perbaikan. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

REFERENSI

- [1] M. Ulum, “Kemiskinan Masyarakat Perkotaan,” *Academia.Edu*, 2019, [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/63987327/Jurnal_Miftahul_Ulum20200721-45976-o9dul0.pdf
- [2] Winne Ayunda Gaiska, Naufal Gama Affandyar, and Muhammad Yasin, “Analisis Penyebab, Konsekuensi, Dan Solusi Potret Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto Pasca Reformasi,” *J. Akuntan Publik*, vol. 1, no. 2, pp. 141–149, 2023, doi: 10.59581/jap-widyakarya.v1i2.386.
- [3] B. P. Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia,” *Ber. Resmi Stat.*, no. 56, pp. 1–12, 2020, [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>
- [4] Badan Pusat Statistik, “STATISTIK Profil Kemiskinan di Indonesia,” *Profil Kemiskin. di Indones. Maret*, vol.

- 07, no. 56, pp. 1–12, 2021.
- [5] B. P. Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022,” *Badan Pus. Stat.*, no. 51, pp. 1–16, 2022.
 - [6] [Http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023,” *Badan Pus. Stat.*, no. 47, pp. 1–16, 2023, [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
 - [7] Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XXVI tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Per Maret 2023,” no. 50, pp. 1–16, 2023, [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html#:~:text=Jumlah penduduk miskin pada Maret,yang sebesar 7%2C53 persen>.
 - [8] N. A. A. Siswati Saragi, Maria Ulfa Batoebara, “ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN,” *Anal. Pelaks. Progr. Kel. HARAPAN DI DESA KOTA RANTANG Kec. HAMPARAN PERAK*, vol. VIII, pp. 1–10, 2021.
 - [9] P. Rahayu and Hanik Fitriani, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo,” *Niqosiya J. Econ. Bus. Res.*, vol. 3, no. 1, pp. 146–155, 2023, doi: 10.21154/niqosiya.v3i1.1758.
 - [10] M. Ernawati, P. Studi, I. Administrasi, S. Tinggi, and I. Administrasi, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako Di Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang Dan Desa Piyait),” pp. 1001–1010, 2024.
 - [11] S. I. Rodiyah, “Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Sidoarjo Regency : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Sidoarjo,” *Implement. Non-Cash Food Assist. Progr. Sidoarjo Regency Implementasi Progr. Bantu. Pangan Non Tunai di Kabupaten Sidoarjo*, vol. 20, pp. 1–7, 2022.
 - [12] A. Ilosa, M. Nurjana, and U. Sultan Syarif Kasim Riau, “Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,” *IJBEM Indones. J. Bus. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 2, pp. 19–26, 2022, [Online]. Available: <https://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem>
 - [13] Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif),” *Metod. Penelit. Kualitatif*, pp. 1–274, 2023, [Online]. Available: <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
 - [14] KRISTINA APRILIANI PUTRI, “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM SEMBAKO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI KECAMATAN BANYUMANIK, KOTA SEMARANG,” vol. 1945, 2021.
 - [15] V. D. Windari and I. Rodiyah, “Mengubah Sistem Kesejahteraan Sosial : Wawasan dari Sistem Informasi Generasi Selanjutnya (SIKS-NG),” no. 1, pp. 1–17, 2024.
 - [16] P. N. D. Sekarini and I. U. Choiriyah, “Efektivitas Program Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo,” *Web Sci. ...*, no. 4, pp. 1–15, 2022, [Online]. Available: <https://webofscientist.pubmedia.id/index.php/WebofScientist/article/view/36>
 - [17] T. S. Andaru Hardiannursholeh, “Analisis efektifitas dan dampak pengadaaan kartu tani di desa karanganom kecamatan kauman kabupaten tulugagung,” vol. 7, no. 5, pp. 89–104, 2022.
 - [18] H. Purnawan, Mardianto, H. Noviyanto, and E. Darmawi, “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur,” *Mimb. J. Penelit. Sos. dan Polit.*, vol. 12, no. 2, pp. 288–296, 2023.
 - [19] H. Kolondam, “EFEKTIVITAS BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KELURAHAN MALALAYANG SATU BARAT KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO,” vol. VIII, no. 113, pp. 72–84, 2022.
 - [20] M. Hasanah, Reno Affrian, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Pangan,” pp. 137–144, 2024.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.